

## Indonesia di Usia 80 Tahun: Refleksi Kritis Kebangsaan

Linus Kali Palindangan<sup>1</sup>, Antonius Dieben Robinson Manurung<sup>2</sup>, Ahmad Ajis<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Esa Unggul, Indonesia

linus.kali@esaunggul.ac.id<sup>1</sup>, antonius.manurung@esaunggul.ac.id<sup>2</sup>, ahmadajis1003@student.esaunggul.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

In 2025, the Republic of Indonesia marks its 80th anniversary, offering a critical moment to evaluate the nation's collective performance across key sectors. This study provides a comprehensive and reflective assessment of Indonesia's political, economic, social, educational, cultural, environmental, and global development trajectories. Using a qualitative-descriptive approach and a systematic literature review, the analysis draws on official government documents, international institutional reports, scholarly publications, and credible media investigations. The findings show that although Indonesia has made notable progress—emerging as the world's third-largest democracy and Southeast Asia's largest economy—substantial structural challenges remain. Democratic consolidation is hindered by ethical violations in judicial institutions, increasing oligarchic influence, and stagnation in anti-corruption efforts. Economic growth has not fully translated into equitable distribution, evidenced by persistent inequality, governance failures in social assistance, and continued labor-market mismatches. The education and health sectors demonstrate improved access yet uneven quality, while environmental degradation and a slow clean-energy transition pose urgent threats to sustainability. Globally, Indonesia plays an active diplomatic role, but institutional constraints limit its international effectiveness and innovation capacity. The study aims at arguing that Indonesia's 80-year milestone should serve as a catalyst for reaffirming constitutional ideals and strengthening governance, equity, and sustainability as essential foundations for realizing the vision of 2045 Golden Indonesia.

**Keywords:** Democratic consolidation, economic inequality, environmental sustainability

### ABSTRAK

Pada tahun 2025, Republik Indonesia menandai usia ke-80 tahun, sebuah momen krusial untuk mengevaluasi kinerja kolektif bangsa di berbagai sektor utama. Studi ini menyajikan penilaian komprehensif dan reflektif terhadap perkembangan Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, lingkungan hidup, serta peran global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan tinjauan literatur sistematis, analisis ini merujuk pada dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, publikasi akademik, serta investigasi media yang kredibel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan—menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara—tantangan struktural yang substansial masih bertahan. Konsolidasi demokrasi terhambat oleh pelanggaran etik dalam lembaga peradilan, meningkatnya pengaruh oligarki, dan stagnasi upaya pemberantasan korupsi. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan distribusi yang adil, terlihat dari ketimpangan yang persisten, lemahnya tata kelola bantuan sosial, dan ketidaksesuaian berkelanjutan antara pasar tenaga kerja dan lulusan pendidikan. Sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan perluasan akses, tetapi kualitasnya masih belum merata, sementara degradasi lingkungan dan lambatnya transisi menuju energi bersih menimbulkan ancaman mendesak bagi keberlanjutan. Di tingkat global, Indonesia memainkan peran diplomatik yang aktif, namun keterbatasan institusional membatasi efektivitas internasional dan kapasitas inovasinya. Studi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pencapaian 80 tahun Indonesia harus menjadi suatu katalis untuk meneguhkan kembali cita-cita konstitusional serta memperkuat tata kelola, keadilan, dan keberlanjutan sebagai fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

**Kata Kunci:** Konsolidasi demokrasi, ketimpangan ekonomi, keberlanjutan lingkungan

### PENDAHULUAN

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 2025, Indonesia telah menapaki perjalanan selama delapan dekade yang bukan sekadar rentang waktu, melainkan merupakan kisah panjang yang mencerminkan dinamika sejarah, pertumbuhan politik, transformasi ekonomi, serta kekayaan budaya yang terus berubah dan membentuk jati diri bangsa. Pada usianya yang ke-80 tahun, Indonesia telah

bertumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Prestasi ini tentu membanggakan, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah capaian-capaian tersebut telah benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah demokrasi yang dijalankan telah menjamin partisipasi politik yang sehat, keadilan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil? Sejauh mana pertumbuhan ekonomi menjawab persoalan kemiskinan struktural, ketimpangan regional, dan kualitas sumber daya manusia? Bagaimana kondisi pendidikan dan kesehatan kita saat ini? Apakah pembangunan budaya dan lingkungan hidup turut menjadi prioritas dalam perjalanan bangsa? Di tengah tatanan dunia yang berubah cepat, di manakah posisi Indonesia dalam percaturan global?

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan refleksi kritis dan analitis terhadap kinerja Indonesia dari berbagai aspek utama kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, dan peran internasional. Landasan evaluasi ini merujuk pada cita-cita luhur kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang hendak membawa bangsa ini menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaya saing tinggi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kajian literatur sistematis untuk menilai kinerja Indonesia dari berbagai sektor pembangunan yang telah memasuki usia ke-80 tahun. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menyusun gambaran komprehensif berbasis data sekunder serta memberi ruang untuk refleksi kritis terhadap capaian dan tantangan nasional.

Sumber data diperoleh dari berbagai dokumen resmi negara (BPS, Bappenas, Kemendikbudristek, BPJS Kesehatan), laporan lembaga internasional (OECD, World Bank, Freedom House, WIPO, Global Forest Watch, IESR), artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan investigatif media kredibel (Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Detik). Seluruh sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi, validitas, serta kedalaman analitis dalam memberikan potret objektif mengenai kondisi Indonesia.

Proses analisis dilakukan melalui analisis isi dan analisis tematik, yang meliputi: (1) identifikasi isu-isu utama dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, dan diplomasi; (2) kategorisasi tematik berdasarkan konsep-konsep pembangunan nasional dan kerangka konstitusional; (3) triangulasi data untuk memastikan konsistensi antar-sumber; dan (4) sintesis temuan dalam bentuk refleksi kritis terhadap visi Indonesia Emas 2045 dan amanat Pembukaan UUD 1945. Melalui prosedur ini, penelitian menghasilkan analisis yang holistik, berbasis bukti, dan relevan secara ilmiah untuk pengembangan kajian pembangunan Indonesia kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Politik: Konsolidasi Demokrasi yang Belum Tuntas

Dinamika demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 menunjukkan kemajuan dalam aspek prosedural, seperti pemilu langsung dan kebebasan pers, namun belum sepenuhnya terbebas dari problematika etik dan kelembagaan. *Freedom House* (2024) menempatkan Indonesia dalam kategori *partly free* dengan skor kebebasan 61/100, mengindikasikan masih adanya defisit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi substantif.

Salah satu contoh krusial dari kelemahan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menuai kontroversi, karena memberikan ruang hukum bagi Gibran Rakabuming Raka—putra Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman—untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024 meski belum mencapai usia minimal 40 tahun. Putusan tersebut dinilai sebagai bentuk *judicial activism* yang problematik, terutama karena diputuskan oleh MK yang dipimpin oleh figur dengan konflik kepentingan kekerabatan. Hal ini berujung pada pemeriksaan etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang melalui putusan No. 2/MKMK/L/XI/2023 menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap lima prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yakni ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi, serta kepantas dan kesopanan. Sebagai konsekuensinya, Anwar dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK (Kompas, 2023).

Setelah MK menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan tersebut, keabsahan moral dan politik dari hasil putusan MK itu pun dipertanyakan secara luas. Akibatnya, legitimasi Gibran sebagai wakil presiden terpilih menjadi sangat merosot di mata sebagian masyarakat, yang menganggap proses pencalonannya tidak memenuhi prinsip keadilan dan integritas

hukum. Bahkan, sejumlah kelompok sipil dan akademisi mulai mengusulkan opsi pemakzulan sebagai bentuk koreksi atas proses yang dianggap cacat secara etik dan moral (Kompas.com, 2023; Tempo.co, 2023). Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi Indonesia telah membuka ruang partisipasi dan kebebasan, sistem kelembagaan dan etika pejabat tinggi negara masih menghadapi tantangan serius yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan demokrasi itu sendiri.

Di sisi lain, otonomi daerah memang menghasilkan kemajuan di beberapa wilayah, namun juga menimbulkan fragmentasi kebijakan dan disparitas pembangunan yang tajam—sebuah kenyataan yang pernah digambarkan secara simbolik oleh mahasiswa dalam laporan Tempo dengan ungkapan *Indonesia gelap* (Tempo, 19 Februari 2025), sebagai bentuk kekecewaan terhadap arah pembangunan yang dinilai belum berpihak pada keadilan sosial dan pemerataan. Menanggapi kritik tersebut Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, justru membala dengan pernyataan, *Kau yang gelap*. Ungkapan tersebut menuai kontroversi, karena dinilai mencerminkan resistensi elite terhadap kritik serta memperlihatkan jauhnya jarak empati antara pengambil kebijakan dan keresahan masyarakat. Boleh jadi ungkapan tersebut keduanya merepresentasikan realitas. Artinya bagi masyarakat biasa, Indonesia gelap sedangkan bagi masyarakat kaya dan penguasa, Indonesia cerah.

## **Kinerja Ekonomi: Tumbuh, tetapi Belum Merata**

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketangguhan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi pasca pandemi berada di kisaran 5% per tahun (BPS, 2024). PDB Indonesia mencapai lebih dari USD 1,4 triliun, dan diproyeksikan masuk 5 besar ekonomi dunia pada 2045 (Bappenas, 2019). Capaian tersebut segera diikuti pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan tersebut diikuti oleh distribusi yang adil?

Di sisi lain beban utang luar negeri Indonesia hingga kuartal I tahun 2025, tercatat sebesar sekitar USD 400 miliar, dengan rasio terhadap PDB berada di kisaran 30%, menurut data Bank Indonesia. Meskipun rasio ini masih dalam batas aman menurut standar internasional, tren pertumbuhan utang yang lebih cepat dibandingkan pendapatan negara memunculkan kekhawatiran akan keberlanjutan fiskal dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal.

Koefisien Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berada pada angka 0,381 (BPS, 2024), sebuah sinyal kuat bahwa jurang antara kelompok kaya dan miskin tetap lebar. Data ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin dari realitas sosial yang jauh dari cita-cita keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Urbanisasi yang pesat memang telah meningkatkan taraf hidup sebagian penduduk kota besar, tetapi pada saat yang sama justru memperparah marginalisasi wilayah pedesaan, terutama di kawasan timur Indonesia. Ketimpangan struktural pun terlihat nyata dalam konsentrasi kepemilikan lahan yang timpang dan rendahnya partisipasi masyarakat akar rumput dalam ekosistem ekonomi digital. Ironisnya, intervensi negara dalam bentuk bantuan sosial yang semestinya menjadi jaring pengaman justru menghadirkan masalah baru. Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap bahwa ada dana bantuan sosial disalahgunakan untuk judi online bahkan mengalir ke jaringan pendanaan terorisme (CNN Indonesia, 11 Juli 2025). Temuan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan dan tata kelola bantuan sosial, tetapi juga memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial di Indonesia bukan semata soal distribusi ekonomi, melainkan juga soal integritas kebijakan dan kepercayaan publik terhadap negara.

Di sektor ketenagakerjaan, Indonesia masih menghadapi tantangan informalitas kerja yang tinggi (sekitar 57% dari total pekerja), serta *mismatch* antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri (World Bank, 2023). Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan universitas mencapai sekitar 5,6%, lebih tinggi dibandingkan lulusan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah. Hal ini menghambat produktivitas nasional dan mengancam potensi bonus demografi.

## **Kinerja Pendidikan: Akses Luas, tetapi Mutu Belum Merata**

Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ini membawa perluasan akses pendidikan secara signifikan. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah masing-masing telah mencapai lebih dari 95% dan 80% (Kemendikbudristek, 2023). Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan perluasan pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah telah meningkatkan inklusi pendidikan, terutama bagi kelompok rentan.

Namun demikian, tantangan serius masih membayangi mutu pendidikan. Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

rendahnya mutu pendidikan Indonesia meliputi kualitas guru, disparitas sarana dan prasarana antardaerah, serta beban administratif yang tinggi dalam sistem pengelolaan sekolah.

Pada tingkat pendidikan tinggi, ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi masalah serius. Ketimpangan ini menyebabkan banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan bidang studi mereka. Laporan *World Bank* (2023) menggarisbawahi adanya *mismatch* horizontal—lulusan bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya—and *mismatch* vertikal, yakni pekerjaan yang tidak setara dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Temuan Tracer Study Nasional Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30–40% lulusan yang memperoleh pekerjaan sesuai bidang studi mereka dalam enam bulan pertama setelah kelulusan. Masalah ini mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pendidikan tinggi, mulai dari kurikulum yang kurang responsif terhadap kebutuhan pasar, minimnya penguatan *soft skills*, rendahnya literasi digital, hingga lemahnya kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan global dan disrupti teknologi.

Persoalan di tingkat pendidikan tinggi sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari akar permasalahan pada Tingkat pendidikan yang mendahuluinya, yakni pendidikan dasar dan menengah. Laporan *DetikEdu* (12 November 2024) mengungkapkan bahwa masih banyak siswa SMP dan SMA di Indonesia yang belum menguasai keterampilan dasar seperti operasi matematika sederhana, termasuk pembagian dan perkalian. Walaupun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa temuan ini tidak boleh terlalu digeneralisasi (*DetikEdu*, 12 November 2024), masalah tersebut justru merupakan representasi adanya persoalan kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan ini memperlebar jurang antara kelompok siswa yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan mereka yang tertinggal, dan pada akhirnya berdampak pada kesiapan mereka dalam memasuki jenjang pendidikan tinggi maupun dunia kerja. Tanpa intervensi sistemik, kesenjangan ini akan terus mereproduksi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

## Kinerja Sosial dan Budaya: Kemajuan Akses, Ketertinggalan Kualitas

Pada bidang sosial, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam hal akses pendidikan dan kesehatan. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar mencapai lebih dari 90% (Kemendikbud, 2023), dan angka harapan hidup meningkat menjadi 73,5 tahun. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup lebih dari 250 juta penduduk menjadi salah satu sistem jaminan sosial terbesar di dunia (BPJS Kesehatan, 2023). Namun, kualitas layanan masih menjadi tantangan. Survei PISA (2022) menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia berada di bawah rata-rata OECD. Di sektor kesehatan, ketimpangan layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap lebar, dan sistem rujukan masih belum optimal.

Dari sisi budaya, Indonesia masih menghadapi dilema antara pelestarian kebudayaan lokal dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Dalam hal ini, Suparman (2020) menyoroti perlunya pengembangan kurikulum yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini. Program pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan kurikulum nasional menjadi solusi untuk membentuk generasi penerus dengan pemahaman mendalam terhadap kekayaan budaya sendiri. Tantangan lainnya adalah menurunnya toleransi sosial, dengan meningkatnya ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Pancasila, sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa, menjadi sangat penting karena mampu berperan sebagai penyaring nilai-nilai baru sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Patut pula disyukuri bahwa dari bumi pertiwi selalu saja tampil pribadi-pribadi yang berjuang untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal. Walaupun demikian tetap relevan pertanyaan: bagaimanakah pendidikan dan kebijakan publik dapat dirancang untuk menyeimbangkan pelestarian budaya lokal dengan keterbukaan terhadap arus globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa?

## Kinerja Lingkungan dan Ketahanan Nasional: Agenda yang mendesak

Krisis lingkungan menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di dunia. Data *Global Forest Watch* (2023) mencatat kehilangan 1,45 juta hektar hutan primer antara tahun 2015 hingga 2022. Sementara itu, bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi, memperlihatkan kerentanan wilayah terhadap kerusakan alam yang akut. Di sisi energi, meskipun pemerintah telah menetapkan komitmen menuju *net zero emission* pada 2060, bauran energi nasional masih didominasi oleh batu bara, yang menyumbang sekitar 60% kebutuhan energi. Transisi menuju energi terbarukan berjalan lambat karena terbatasnya investasi dan inkonsistensi kebijakan (IESR, 2023). Salah satu pertanyaan penting yang layak diajukan adalah:

bagaimanakah Indonesia dapat mempercepat transisi energi bersih tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat rentan?

Ketahanan nasional saat ini perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya dalam kerangka militeristik, tetapi mencakup aspek ketahanan pangan, air, dan digital. Meningkatnya tantangan keamanan siber menuntut sistem pertahanan yang mampu menghadapi ancaman non-konvensional yang kompleks dan cepat berubah. Apakah kebijakan ketahanan nasional kita sudah cukup responsif terhadap ancaman multidimensional di era digital dan krisis iklim?

## Kinerja Global: Menegaskan Peran Strategis Indonesia

Indonesia terus menunjukkan peran aktif dalam tataran global melalui keterlibatannya dalam berbagai forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan Konferensi Perubahan Iklim (COP). Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 memperkuat posisinya sebagai jangkar stabilitas kawasan, terutama dalam menanggapi krisis Myanmar dan mendorong kerja sama ekonomi digital di Asia Tenggara. Sementara itu, keberhasilan Indonesia dalam memimpin Presidensi G20 pada 2022—dengan tema *Recover Together, Recover Stronger*—menunjukkan kapasitas diplomasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan geopolitik global, termasuk ketegangan antara blok negara-negara besar terkait perang di Ukraina dan krisis energi global. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam COP28 (2023) di Dubai dengan menegaskan komitmennya untuk mengurangi emisi, serta menyoroti pentingnya pembiayaan iklim bagi negara berkembang.

Namun, efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satunya adalah ketidaksinkronan antara kementerian dan lembaga, misalnya antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan dalam isu perdagangan luar negeri dan diplomasi ekonomi. Selain itu, jumlah diplomat Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara sejenis. Menurut *Center for Strategic and International Studies* (2022), jumlah diplomat aktif Indonesia hanya sekitar 1.200 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Jepang (lebih dari 5.000) atau India (sekitar 4.700), yang berarti beban kerja dan wilayah cakupan diplomasi Indonesia sangat besar dengan sumber daya yang terbatas.

Di bidang ekonomi global, Indonesia masih berjuang dalam meningkatkan daya saing dan kompleksitas industrinya. Berdasarkan *Global Innovation Index 2023* yang diterbitkan oleh WIPO, Indonesia berada pada peringkat ke-87 dari 132 negara, tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia (ke-36) dan Thailand (ke-43). Hal ini mencerminkan rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), yang masih berada di bawah 1% dari PDB, serta lemahnya kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mendorong ekosistem inovasi. Upaya seperti pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih menghadapi tantangan koordinasi dan tata kelola, serta belum sepenuhnya menghasilkan dampak signifikan terhadap transformasi industri nasional. Pertanyaannya adalah mampukah Indonesia merumuskan serta melaksanakan kebijakan luar negeri dan strategi inovasi nasional secara konsisten dan berkesinambungan secara lebih terintegrasi dan berbasis data, agar mampu memaksimalkan posisi strategisnya di tengah persaingan global yang semakin kompleks?

## KESIMPULAN

Menginjak usia ke-80 tahun, Republik Indonesia menghadapi momen krusial untuk merefleksikan capaian pembangunan dan memperbarui komitmen terhadap amanat kemerdekaan: mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi bagi perdamaian dunia. Evaluasi terhadap kinerja nasional tidak dapat dilakukan secara seremonial, melainkan harus jujur, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 seharusnya tidak sekadar dimaknai sebagai target kuantitatif ekonomi, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas hidup rakyat, penguatan moralitas publik, serta keberlanjutan antargenerasi. Dalam kerangka inilah, sejumlah pertanyaan mendasar patut direnungkan: apakah partisipasi politik rakyat benar-benar memiliki daya tawar substantif? Mengapa hukum tampak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Ketika uang dan oligarki mendominasi proses elektoral, apakah rakyat biasa masih memiliki ruang dalam politik yang adil?

Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan optimisme, melainkan untuk memperkuat kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam memperbaiki tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan Indonesia tidak ditentukan semata oleh pencapaian usia, tetapi oleh kesetiaan terhadap cita-cita dasarnya dan oleh kemampuan untuk terus belajar, berbenah, serta bergerak maju secara inklusif. Dalam konteks ini, demokrasi harus dikembalikan pada marwahnya sebagai ruang pengabdian kepada rakyat, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan media harus tetap menjadi benteng objektivitas

dan nurani publik. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat merayakan kemerdekaan sebagai proses yang hidup, dinamis, dan penuh harapan bagi semua.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator makroekonomi dan ketimpangan* (Vol. 55, No. 3).
- Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045: Menuju negara maju dan berdaulat*.  
[https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy\\_Paper/Dokumen%20lengkap%20202045\\_final.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Dokumen%20lengkap%20202045_final.pdf)
- DetikEdu. (2024). *Viral anak SMP-SMA tak bisa perkalian pembagian, Menteri Mu'ti: Jangan overgeneralisasi*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7635402/viral-anak-smp-sma-tak-bisa-perkalian-pembagian-menteri-muti-jangan-overgeneralisasi>
- DetikNews. (2025, July 11). *Setengah juta penerima bansos terindikasi judol hingga danai terorisme*.  
<https://news.detik.com/berita/d-8006012/setengah-juta-penerima-bansos-terindikasi-judol-hingga-danai-terorisme>
- Freedom House. (2024). *Freedom in the world 2024: Indonesia*.  
<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024>
- Global Forest Watch. (2023). *Forest loss in Indonesia*.  
<https://x.com/globalforests/status/1682405182972522496>
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan tahunan: Korupsi dan dinamika penegakan hukum di Indonesia*. ICW.
- Institute for Essential Services Reform. (2023). *Indonesia energy transition outlook*.  
[https://www.sipet.org/Publications\\_details.aspx?id=9cWFMKs8suAWLQ2ctsU/dA](https://www.sipet.org/Publications_details.aspx?id=9cWFMKs8suAWLQ2ctsU/dA)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Statistik pendidikan Indonesia 2022/2023*.  
<https://data.kemendikdasmen.go.id/publikasi/p/guru-tendik-buku-analisis/indonesia-educational-statistics-in-brief-2022-2023>
- Nugraheni, A. I. (2023). Tinjauan literatur: Evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. *Jurnal Kesehatan*, 12(2). <https://doi.org/10.46815/jk.v12i2>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *PISA results 2022*.  
[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/pisa-2022-results-volume-v\\_c2e5f9fb/c2e44201-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/pisa-2022-results-volume-v_c2e5f9fb/c2e44201-en.pdf)
- Suparman, T. (2020). *Kurikulum dan pembelajaran*. CV Sarnu Untung.
- Tempo. (2025). *Luhut tanggapi "Indonesia gelap": Yang gelap kau, bukan Indonesia*.  
<https://www.tempo.co/ekonomi/luhut-tanggapi-aksi-indonesia-gelap-yang-gelap-kau-bukan-indonesia-1209409>
- World Intellectual Property Organization. (2023). *Global innovation index 2023* (16th ed.).  
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-16th-edition.pdf>
- World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Investing in people*. <https://baladena.id/optimalisasi-bonus-demografi-sebagai-strategi-pembangunan-sdm-menuju-indonesia-emas-2045/>